

Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo

Mohammad Wasil, Nika Syahdila Putri, Ayu Larasati, Nurliana Mufida



Mohammad Wasil; Institute Kesehatan dan Bisnis Surabaya.

Nika Syahdila Putri, Ayu Larasati, Nurliana Mufida; Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2020-06-17

Received in revised form 2020-07-18

Accepted 2020-08-06

Kata kunci:

Pendapatan Asli Daerah,
Dana Perimbangan,
Kemandirian Keuangan
Daerah.

Keywords:

Regional Original Income,
Balancing Fund, Regional
Financial Independence.

How to cite item:

Mohammad Wasil, Nika
Syahdila Putri, Ayu
Larasati, Nurliana Mufida.
(2020). Analisis Pengaruh
Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan Dana
Perimbangan Terhadap
Kemandirian Keuangan
Daerah di Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2010-2018.
*Journal of Regional
Economics Indonesia*, 1(2).

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan dalam kemandirian daerah di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2010-2018. Metode penelitian menggunakan study pustaka dengan data time series dari tahun 2010-2018 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan alat analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Abstract

The purpose of this study is to analyze the effect of local revenue (PAD) and balance funds on regional independence in Sidoarjo Regency in 2010-2018. The research method in this study uses a literature study with time series data from 2010-2018 which is sourced from the Central Statistics Agency (BPS). While the analysis tool used is multiple linear regression. The results of this study indicate that Regional Original Income has a positive and significant effect on Regional Financial Independence, Balancing Funds have a negative and significant effect on Regional Financial Independence, Regional Original Income and Balanced Funds simultaneously have a significant effect on Regional Financial Independence.

1. Latar Belakang

Untuk dapat menciptakan kemandirian daerah, pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia mulai menerapkan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Menurut Sun'an & Senuk (2017), desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam kaitan

* Mohammad Wasil, Nika Syahdila Putri, Ayu Larasati, Nurliana Mufida.

© 2020 University of Merdeka Malang All rights reserved.

Peer review under responsibility of University of Merdeka Malang All rights reserved.

dengan kebijakan keuangan negara yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat. Maka dengan kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom. Melihat luasnya wilayah Indonesia dan banyaknya jumlah penduduk, pelimpahan wewenang ke daerah dalam segala bidang ini dianggap tepat. Selain dapat mengurangi ketimpangan antar daerah juga dapat mengurangi ketimpangan antara pemerintah dan daerah. Desentralisasi fiskal sendiri merupakan konsekuensi dari penerapan otonomi daerah di Indonesia.

Otonomi daerah adalah hak dan wewenang yang diberikan kepada setiap daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya. Diberlakukannya sistem otonomi daerah tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang dibentuk dalam mengatur pemerintahan daerah (Kurniawan, 2012). Penerapan otonomi daerah sesungguhnya dapat menjadi peluang besar untuk daerah dalam meningkatkan kinerja keuangannya. Dimana setiap daerah tersebut memiliki hak dan wewenang mengelola sumber dayanya sendiri.

Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh oleh tiap pemerintahan Kabupaten/Kota. PAD merupakan poin utama dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Selain PAD, Dana Perimbangan juga salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Akan tetapi, diharapkan setiap daerah tidak menjadikan dana perimbangan sebagai sumber utama pendapatan daerah tapi menjadikannya sebagai sumber pendapatan pendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sehingga tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan daerahnya semakin kecil.

Dengan semakin kecilnya tingkat ketergantungan tersebut, maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri.

Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu daerah dengan kepentingan memperkuat kemandirian daerah yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan pembiayaan pembangunan daerah yang semakin tinggi, sementara PAD tidak selalu tumbuh secara konsisten. Sementara itu, ketergantungan terhadap Dana Perimbangan setiap tahunnya selalu meningkat. Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan dalam kemandirian daerah di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2010-2018.

2. Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian ini terdiri dari tiga konsep penting pembentuk keuangan daerah, yaitu: (i) Pendapatan Asli Daerah atau PAD; (ii) Dana Perimbangan; dan (iii) kemandirian keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan potensi penerimaan yang berasal dari daerah dan pengelolaannya dilakukan oleh daerah itu sendiri. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah adalah: (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah; dan (iv) Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Sementara Dana Perimbangan adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke daerah-daerah yang tujuannya untuk konsolidasi desentralisasi fiskal mengurangi adanya ketimpangan serta meningkatkan kemandirian setiap daerah. Dana Perimbangan terdiri dari: (i) Dana Bagi Hasil atau DBH; (ii) Dana Alokasi Umum atau DAU; dan (iii) Dana Alokasi Khusus atau DAK. Sedangkan Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh oleh tiap pemerintah Kabupaten/Kota. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan bantuan yang diberikan pemerintah pusat maka pemerintah kota tersebut tingkat kemandirian keuangan daerahnya tinggi.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi pustaka yang informasinya didapatkan melalui catatan, literatur, dan dokumentasi yang relevan dengan pembahasan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series selama 4 tahun terakhir yaitu tahun 2010-2018. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo sedangkan variabel bebas adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Kabupaten Sidoarjo.

Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS 13.0. Regresi linier berganda yaitu mengukur hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Menurut Drapper dan Smith (1992), analisis regresi adalah metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data dan mengambil kesimpulan mengenai hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Hubungan tersebut pada umumnya dinyatakan dalam bentuk statistik yang menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Model persamaan regresi pada penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + c$$

Dimana :

Y = Kemandirian Keuangan Daerah

X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X2 = Dana Perimbangan

α = Konstanta

$\beta_1 \beta_2$ = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel

4. Hasil dan Pembahasan

Dari data yang diperoleh mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2010 - 2018 dapat diketahui pada tahun 2010 penerimaan Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp 356.161.848.548,00. Tahun 2011 penerimaan Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp 484313737307,00. Tahun 2012 penerimaan Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp 669.617.556.903,00. Tahun 2013 penerimaan

Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp 858.433.670.218,00. Tahun 2014 penerimaan Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp 1.115.332.938.501,00. Tahun 2015 penerimaan Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp 1.266.786.727.409,00. Tahun 2016 penerimaan Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp 1.335.284.797.901,00. Tahun 2017 penerimaan Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp 1.671.806.819.697,00. Tahun 2018 penerimaan Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp 1.685.558.666.147,00.

Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama Sembilan periode terakhir cenderung meningkat, hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memerlukan banyak dana untuk menjalankan program pemerintahan. Disamping itu, meskipun pendapatan asli daerah Kabupaten Sidoarjo terus meningkat namun belum bisa memenuhi pembiayaan terhadap belanja daerah. Sehingga dana perimbangan menjadi dana yang diperlukan dalam membiayai belanja daerah. Pada tahun 2010 sampai tahun 2014 penerimaan Dana Perimbangan yang diberikan Pemerintah Pusat meningkat secara berturut-turut sebesar 969.298.842.540,00; 1.029.082.329.425,00; 1.201.941.011.351,00; 1.311.016.195.099,00,00. Penurunan penerimaan dana perimbangan pun dialami oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2015 sebesar 1.388.639.002.033,00. Pada tahun 2016 sampai 2018 penerimaan dana perimbangan mengalami peningkatan secara berturut-turut sebesar 1.690.087.000.000,00; 1.708.887.132.594,00; 1.793.474.341.790,00.

Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo menggunakan rasio kemandirian mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2010 tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo sebesar 27,01% dan mengalami peningkatan pada tahun selanjutnya menjadi 31,84%. Pada tahun 2012 sampai 2018 mengalami kenaikan dan penurunan yaitu 40,64%, 46,73%, 51,68%, 55,33%, 57,24%, 70,43%, 63,68%.

Model persamaan regresi untuk kemandirian sebagai berikut:

$$Y_1 = 19.885 + 2.96E-011X_1 - 1.1E-012X_2$$

Tabel 01. Analisis Regresi Linear Berganda Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	19.885	10.821	
PAD	2.96E-011	.000	1.008
DAPER	-1.1E-012	.000	-.023

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka dapat disimpulkan hasil persamaan sebagai berikut:

- Konstan (α) dari 19.885 menunjukkan konstanta (Y_1), dengan asumsi masing-masing nilai variabel independen (X_1, X_2) konstan.
- Koefisien PAD (X_1) mempunyai pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Sidoarjo dengan koefisien sebesar 2.96E-011. Artinya apabila pendapatan asli daerah naik satu persen (1%), maka kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Sidoarjo akan naik sebesar 2.96E-011 persen, begitupun sebaliknya.
- Koefisien Dana Perimbangan (X_2) mempunyai pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Sidoarjo dengan koefisien sebesar 1.1E-012. Artinya apabila dana perimbangan naik satu persen (1%), maka kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Sidoarjo akan turun sebesar 1.1E-012 persen, begitupun sebaliknya.

A. Uji Autokorelasi

Tabel 02. Durbin-Watson Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.986 ^a	.972	.962	2.78639	1.754

a. Predictors: (Constant), PAD, DAPER, Kemandirian keuangan daerah

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan SPSS pada tabel 02 di atas, diperoleh nilai DW sebesar 1.754 yang berarti model regresi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah tidak mengandung autokorelasi.

B. Uji Multikolinieritas

Gejala Multikolinieritas terdeteksi jika nilai VIF (variance inflation factor) > 10 . Jika nilai VIF < 10 maka pada model regresi linier berganda tidak ditemukan korelasi antar variabel bebas.

Tabel 03. Uji Multikolinieritas Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error		Tolerance	VIF
(Constant)	19.885	10.821			
PAD	2.96E-011	.000	1.008	.059	1.532
DAPER	-1.1E-012	.000	-.023	.059	1.532

a. Dependent Variable: Kemandirian keuangan daerah

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat disimpulkan bahwa nilai VIF dari semua variabel independent lebih kecil dari 10 ($VIF < 10$), berarti tidak terjadi multikolinieritas.

C. Uji Heterokedastisitas

Tabel 04. Uji Heterokedastisitas Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

		Unstandardized Residual	
Spearman's rho	PAD	Correlation	.100
		Coefficient	.798
		Sig. (2-tailed)	.798
	DAPER	Correlation	.133
		Coefficient	.732
		Sig. (2-tailed)	.732
Unstandardized Residual			1.000
			9

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh tingkat signifikan koefisieni rank spearman untuk variabel bebas PAD (X1) sebesar 0.798 dan Dana Perimbangan (X2) sebesar 0.732 terhadap residual lebih besar dari 0.05 (5%) sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan tersebut tidak terjadi heterokedastisitas.

D. Uji F Signifikan (Simultan)

Uji F Signifikan (Simultan) digunakan untuk menguji pengaruh semua variabel independen terhadap variabel independen secara bersama-sama.

E. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah tahun 2010-2018. Lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 05. Uji F (Simultan) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1594.956	2	797.478	102.715	.000 ^a
	Residual	46.584	6	7.764		
	total	1641.540	8			

Berdasarkan perhitungan menggunakan program SPSS, diperoleh nilai F hitung sebesar 102.715 dengan nilai signifikan sebesar 0.000 dan nilai F tabel sebesar 5.14. Dengan demikian, nilai F hitung > F tabel (102.715 > 5.14). Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah tahun 2010-2018.

F. Uji Signifikan t (parsial)

Uji signifikan t digunakan untuk menguji sejauh mana pengaruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen secara parsial.

Tabel 06. Uji t (Parsial) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	19.885	10.821		1.838	.116
PAD	2.96E-011	.000	1.008	3.544	.012
DAPER	-1.1E-012	.000	-.023	-3.379	.039

G. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Sidoarjo tahun 2010 – 2018 menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dimana diperoleh nilai t hitung $3,544 > t$ tabel $2,44691$ dan nilai signifikan sebesar $0,012 < 0,05$. Hal ini berarti semakin besar pendapatan asli daerah maka semakin besar pula tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, begitu pula sebaliknya semakin kecil pendapatan asli daerah yang diperoleh maka semakin kecil tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Reza Marizka (2013) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah dan kemandirian keuangan daerah memiliki hubungan positif.

H. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Sidoarjo tahun 2010 – 2018 menunjukkan bahwa variabel Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dimana diperoleh nilai t hitung $-3,379 > t$ tabel $2,44691$ dan nilai signifikan sebesar $0,039 < 0,05$. Hal ini berarti semakin besar Dana Perimbangan maka semakin kecil tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Begitu pula sebaliknya semakin kecil dana perimbangan yang diperoleh maka semakin besar tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2009) yang menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Adanya pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu bantuan eksternal yang diterima suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan program pemerintahan apabila mengalami defisit. Tingkat kemandirian keuangan daerah akan terus mengalami peningkatan apabila pendapatan asli daerah lebih besar dari dana perimbangan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2010 – 2018, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
 - a. Pendapatan Asli Daerah berasal dari penerimaan Pajak Daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah selama periode 2010 sampai 2018 terus meningkat. Hal ini dikarenakan pemerintah terus memperluas sumber Penerimaan Asli Daerah dan meningkatkan efektivitas pemungutan sumber Pendapatan Asli Daerah.
 - b. Dana Perimbangan yang diterima berasal dari dana bagi hasil pajak dan bukan dari pusat, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Selama 9 tahun tersebut penerimaan Dana Perimbangan selalu meningkat. Hal ini dikarenakan kebutuhan untuk menjalankan program pemerintah yaitu belanja daerah setiap tahunnya terus meningkat sehingga pemerintah memerlukan Dana Perimbangan untuk menutupi defisit anggaran.
2. Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini menunjukkan semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka tingkat kemandirian keuangan daerah akan meningkat, dan sebaliknya.
3. Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan yang diterima lebih kecil dari Pendapatan Asli Daerah akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah, dan sebaliknya.
4. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Daftar Pustaka

- Bambang, Kurniawan. (2009). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Rutin Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah*. Jurnal. Jember: Universitas Jember.
- R. Neneng Rina Andriani dan Nisa Noor Wahid, 2018, *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006-2015)*, Jurnal Akuntansi Vol. 13 (1).
- Reza, Marizka. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah*. Jurnal. Padang: Universitas Negeri Padang.
-